

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Graha Ilmu. Jogjakarta.
- Burhanudin, A.I. 2011. *THE SLEEPING GIANT* Potensi dan Permasalahan Kelautan. Brilliant Internasional. Surabaya.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., Sitepu, M.J. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu, Pradnya Paramita, Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. 2006. Studi Pengembangan Budidaya Kekerangan di Perairan Provinsi Jawa Timur. CV. Bangun Sejajar Prima. Surabaya.
- Handayani, D., Soelistijadi, R., Sunardi. 2005. Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi. Jurnal teknologi Informasi DINAMIK. Volume X. 2:108-116.
- Indiarto dan Supomo, 1999. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi. PBFE. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kamus besar Bahasa Indonesia. 2010. Pustaka Bahasa. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses tanggal 10 Oktober 2013, pukul 11.42 WIB.
- Kecamatan Watulimo dalam Angka. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kab/Kota. 2010. Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2011. Biorok Teknologi Sebagai Salah Satu Alternatif Upaya Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang. <http://kkp.go.id/index.php/archives/>. Diakses tanggal 20 Oktober, Pukul 20.16 WIB.
- Lillesand, T.M dan R.W . Keifer. 1997. *Remote Sensing and Image Interpretation*. John Wiley & Sons inc. New York.
- Louizzao, A. 2013. Jenis peta dan bagian pada peta. <http://argopura.blogspot.com>. Diakses Tanggal 24 Desember 2013. Pukul 16.23 WIB.

Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 2011. Indonesia ada 13.466 pulau bukan 17.508 pulau. <http://www.menkokesra.go.id/content/di-indonesia-ada-13-466-pulau-bukan-17508-pulau>. Diakses tanggal 1 Februari 2014. Pukul 12.30 WIB.

Narbuko, C dan A. Achmadi 2008. *Meyodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.

Nazir, H. 1988. *Metode Penelitian*. PT. Graha Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Desa Karanggandu. 2009. Pemerintah Desa Karanggandu nomor 04 tahun 2009 tentang tata zonasi kawasan pesisir tingkat Desa Karanggandu.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2007 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan perikanan.

Republik Indonesia. 2001. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang pertanian.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2002 tentang kepariwisataan.

Rudyanto, A. 2004. Kerangka Kerja Sama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP. 22 September 2004.

Statistik Daerah Kabupaten Trenggalek. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Statistik Daerah Kecamatan Watulimo. 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Sukandar, D. Setyohadi dan Y. Didik. 2005. *Pemetaan Sumberdaya Hayati Laut*. Diklat mata kuliah pemetaan sumberdaya hayati laut. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.

Suryabrata. 1983, *Metode Penelitian*. PT. Graha Indonesia, Jakarta.

Widyo, W. 2008. *Pembangunan berkelanjutan Pada Permukiman di Kawasan Industri, Studi Kasus Daerah Perbatasan Surabaya – Mojokerto*.

